

Studi Pemberdayaan Perempuan (Pemulung) Rawan Sosial Ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang

Fauziah Lamaya^{1*}, Amir Syarifudin Kiwang²

Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia

*email : fauziahkoe@gmail.com

Abstract : Empowerment can be said as a way or process in preparing the quality of human resources with the aim that existing human resources become independent and have a wider network and can adapt to the conditions of the current era. Empowerment can make women more developed with adequate knowledge and skills. However, in this case, many women have not received the knowledge and skills so it is difficult for them to overcome every problem they face in their lives. The purpose of this study was to determine the condition of women who are socio-economically vulnerable and what empowerment is carried out by women who are socio-economically vulnerable who are in the TPA Manulai II Village. This study uses a qualitative research method with a field research approach. Researchers will take the research place in Kupang City, especially at the Final Disposal Site (TPA) Manulai II Village. The reason the researcher chose this location is that this place has social problems and there are women who are socio-economically vulnerable. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation, then the data analysis technique uses data reduction (data reduction), display data, and conclusions or verification. The results of this study indicate that the empowerment program for socio-economic vulnerable women at the Manulai II TPA Kupang city has not been able to run well, whether carried out by the government or by non-governmental organizations due to funding constraints, population identity, and instant mentality (easy) from the residents. TPA Manulai II. In the future, both the government and non-governmental organizations need to properly prepare empowerment programs and everything must be done in a structured and orderly manner, starting from data collection, socialization, program implementation, to the evaluation and follow-up stages.

Keywords: *empowerment, socio-economic vulnerable women*

Abstrak : Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu cara atau proses dalam menyiapkan mutu SDM dengan tujuan agar SDM yang ada menjadi mandiri dan memiliki jaringan kerja yang lebih luas serta dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Pemberdayaan dapat menjadikan perempuan lebih berkembang dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Akan tetapi dalam hal ini banyak perempuan yang belum mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit bagi mereka untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi wanita rawan sosial ekonomi dan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh wanita rawan sosial ekonomi yang berada di TPA Kelurahan Manulai II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Peneliti akan mengambil tempat penelitian di Kota Kupang khususnya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Manulai II. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena tempat ini terdapat masalah sosial dan adanya wanita rawan sosial ekonomi. Sumber data adalah data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi,

kemudian teknik analisis datanya menggunakan data *Reduction* (reduksi data), data *display*, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Manulai II kota kupang belum bisa berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat dikarenakan kendala dana, indentitas Kependudukan, serta mental instan (gampang) dari pada penghuni TPA Manulai II. Kedepan baik pemerintah maupun Lembaga swadaya masyarakat perlu menyiapkan secara baik program pemberdayaan dan semua harus dilakukan secara terstruktur dan teratur, mulai dari pendataan, sosialisasi, pelaksanaan program, sampai pada tahap evaluasi dan *follow up*

Kata Kunci : pemberdayaan, perempuan rawan sosial ekonomi, tempat pembuangan akhir

Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Menurut Fahrudin (2014) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya: a) *Enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, b) *Empowering* yaitu : meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, c) *Protecting* yaitu :melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Ismawan (Mardikanto, 2017) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari: 1) Pengembangan sumberdaya manusia; 2) Pengembangan kelembagaan kelompok; 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta); 4) Pengembangan usaha produktif; 5) Penyediaan informasi tepat guna. (Widayanti, 2012) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, dilaksanakan pada berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil.

Dilakukannya pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan dalam kelompok masyarakat yang tertinggal dengan kondisi sosial ekonominya dapat diwujudkan dan terlibat dalam pembangunan secara terbuka dan partisipatif berdasarkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga kelompok tersebut mampu berkembang dan dapat mencari solusi atas suatu permasalahannya sendiri, serta selalu melibatkan masyarakat dalam membangun kemitraan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan atau keberdayaan suatu masyarakat yang sering dianggap

lemah dan terbelakang (Pathony, 2019). Selanjutnya mengenai kondisi masyarakat yang masih tertinggal harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan potensi serta memberdayakannya agar berdaya. Payne dalam (Nasdian, 2014) menyatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu proses yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu cara atau proses dalam menyiapkan mutu SDM dengan tujuan agar SDM yang ada menjadi mandiri dan memiliki jaringan kerja yang lebih luas serta dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Perempuan adalah sosok individu yang seringkali dipandang lemah dan bahkan dianggap tidak berguna oleh sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena pada lingkungan masyarakat tersebut masih melekat budaya yang cenderung lebih mengedepankan kaum laki-laki dan tidak jarang kaum perempuan mendapat hambatan ketika akan melaksanakan aktivitasnya.

Padahal banyak penelitian kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga karena terkadang bisa memainkan peran ganda sebagai ibu rumah tangga disatu sisi dan bekerja membantu ekonomi keluarga pada sisi yang lain. Salah satu solusi untuk perempuan adalah dengan mengembangkan potensi diri perempuan salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Saugi dan Sumarono (2015) adalah adanya kelanjutan pelatihan yang telah diadakan untuk pemberdayaan perempuan dibuktikan dengan adanya inovasi dan variasi lain. Hal tersebut membuktikan pengembangan diri perempuan dapat dibangun, serta dapat menyeimbangi peran laki-laki.

Permasalahan kemampuan perempuan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi perlu untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan dapat menjadikan perempuan lebih berkembang dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Akan tetapi dalam hal ini banyak perempuan belum mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit bagi mereka untuk

mengatasi setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Sebagaimana Hubeis (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah “upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan”

Menurut Novian (2010) pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalahnya, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Hubies (2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek pengetahuan (*kognitif*), keterampilan (*psikomotorik*), dan mental (*afektif*) merupakan komponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkan faktor eksternal menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memberdayakan faktor-faktor internal. Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui, semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan). Selain itu, Harriet, *et al.*, (2014) menambahkan bahwa perempuan dimasyarakat berperan penting dalam kesejahteraan keluarga.

Kelurahan Manulai II terdapat lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) ditemukan 10 (sepuluh) ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemulung botol aqua untuk dijual guna memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Melihat kondisi tersebut, ibu-ibu bekerja di bawah terik panas matahari dan tidak mengenal lelah untuk mendapatkan rezeki dalam menafkahi anak-anaknya. Ada sekitar 10 (sepuluh) ibu rumah tangga yang berstatus janda karena ditinggal suaminya. 5 (lima) ibu diantaranya suaminya meninggal dan 5 (lima) ibu lainnya suaminya bekerja di luar negeri (TKW) dan menghilang tanpa kabar. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi tidak tercapainya kebutuhan ekonomi para ibu-ibu tersebut. Selain itu anak-anak mereka diikutsertakan dalam aktivitas memulung, sehingga membuat anak-anak tersebut harus putus sekolah demi membantu ibunya mencari nafkah.

Secara ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi berada di bawah garis kemiskinan sehingga mereka membutuhkan kebijakan/program yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Namun kebanyakan dari kebijakan/program anti-kemiskinan yang ada gagal. Akibat kurangnya pemahaman tentang kemiskinan itu sendiri. Hal ini antara lain disebabkan oleh penggunaan asumsi bahwa program pemberdayaan yang telah disusun oleh pembuat kebijakan adalah yang ideal untuk semua masalah kerawanan sosial ekonomi.

Perempuan rawan sosial ekonomi termasuk salah satu jenis dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-undang tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara fakta menunjukkan bahwa di Kota Kupang banyak perempuan yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sulit tercapai.

Menurut Dinas Sosial (2015) wanita rawan sosial ekonomi adalah seseorang wanita dewasa yang belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan ciri-ciri wanita dewasa yang belum menikah (adalah wanita anak fakir miskin) atau janda (adalah sebagai kepala keluarga) berusia 18 tahun ke atas dan penghasilan tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Rumah tangga yang dikepalai wanita biasanya miskin karena pendidikan rendah, akses terbatas terhadap: pekerjaan, pelayanan sosial, sumber produksi, modal, kredit dan tanah, serta memiliki sedikit jaringan kekerabatan yang mendukungnya. Terkonsentrasinya kemiskinan diantara perempuan, terutama perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terkait dengan rendahnya pendapatan mereka dibandingkan dengan laki-laki disebut sebagai feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012, yaitu :

1. Perempuan berusia 18-59 tahun;
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga;
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak.

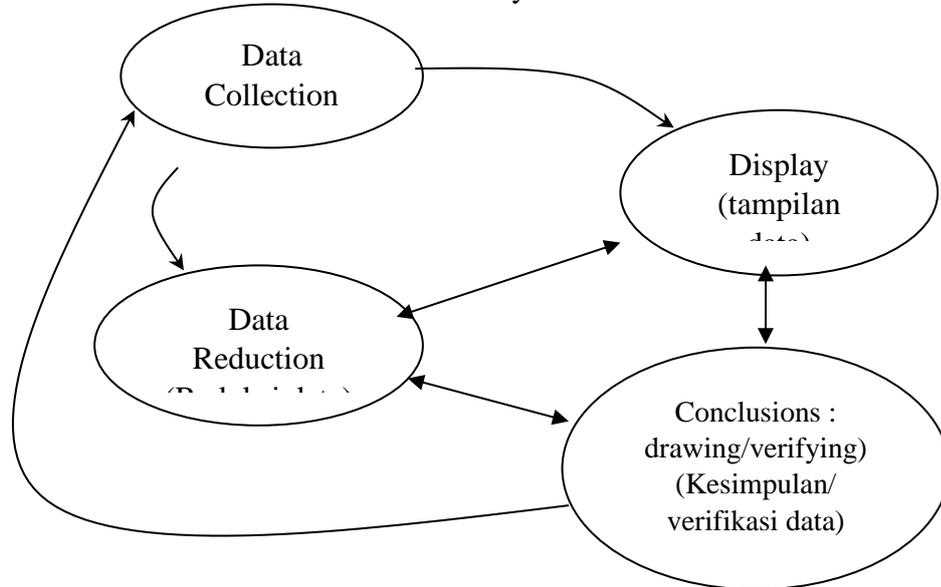
Padahal program pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan perempuan rawan sosial ekonomi dan pemanfaatan potensi lokal yang ada. Sehingga peneliti berpendapat bahwa masih banyak perempuan rawan sosial ekonomi di Kota Kupang yang belum terjangkau secara merata oleh program dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kondisi perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II serta untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam upaya pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kota Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi untuk fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang khususnya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Manulai II. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena tempat ini terdapat masalah sosial dan adanya wanita rawan sosial ekonomi, serta mudah diakses oleh peneliti dan tempatnya juga strategis.

Menurut Sugiyono (2011: 225) sumber data primer, sumber data sekunder adalah sebagai berikut: data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui hasil observasi dan wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara

(*interview guide*), dan dokumentasi. Kemudian Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji reliabilitas (*reliability*) serta uji obyektivitas (*confirmability*). kemudian teknik analisis datanya menggunakan data *Reduction* (reduksi data), data *display*, dan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu:



Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 246)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1992 dibentuknya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang berlokasi di wilayah Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang. pada saat itu juga terbentuklah komunitas pemulung yang menjadikan lokasi TPA sebagai lahan mereka untuk hidup dan mencari nafkah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara maka tingkat pendidikan masyarakat yang ada pada lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), rata-rata pendidikannya adalah SD dan sebagiannya lagi putus sekolah. Hasil peneliti di lapangan wanita rawan sosial ekonomi yang berada di TPA pada umumnya bermata pencaharian sebagai pemulung aqua gelas dimana mereka harus mengumpulkan aqua dalam 1 minggu untuk dijual dan mendapatkan uang kurang lebih 50.000-150.000 itupun kalau pengumpulan aqua gelasnya cukup banyak. Sering kali mereka harus memulung dari jam 06.00 pagi hingga jam 18.00 sore hari, kadang kala anak-anak mereka ikut berkerja sebagai pemulung.

Dampak yang sangat berbahaya bagi mereka adalah kesehatan mereka dengan tidak menggunakan masker dan sarung tangan yang bersih atau steril untuk membungkus tangan dan mulut serta tempat tersebut tidak begitu bagus untuk mereka makan dan beristirahat. Terkadang ada yang menginap digubuk terbuat dari seng-seng bekas untuk tempat tinggal sementara dikarenakan rumahnya jauh. Ada dari mereka juga bukan penduduk dari Kelurahan Manulai II saja tetapi ada juga dari kelurahan lain disekitarnya seperti Kelurahan Alak, Penkase, Namosain dan Bolok. Anak-anak mereka ada yang bersekolah dan tidak bersekolah ada juga yang memiliki anak 3 sampai dengan 4 anak dimana mereka harus menafkahi sendiri tanpa seorang suami. Mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan apapun, tapi hanya semata menggantungkan hidup dari kegiatan sebagai pemulung. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para perempuan pemulung diketahui bahwa rata-rata mereka tidak bersuami. Ada yang ditinggal mati, dicerai dan ditinggalkan begitu saja oleh suami tanpa berita. Ini menjadi beban tersendiri bagi mereka para wanita ini demi untuk melanjutkan hidup sambil mengurus anak-anak mereka.

Kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat termasuk perempuan rawan sosial ekonomi biasanya oleh pemerintah dan lembaga sosial maupun keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pemberdayaan terhadap perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Manulai II dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, serta Forum Komunikasi Perempuan dan Anak kota kupang. Program pemberdayaan yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan, penguatan ekonomi melalui akses permodalan dan pelatihan. Ife dan Tesoriero (2008:662) menjelaskan bahwa “pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*)”

Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan, bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi produktif dan mendapatkan

rekomendasi dari kepala desa/kelurahan setempat. Sayangnya perempuan rawan sosial ekonomi yang ada di TPA Manulai II sering dianggap warga liar karena banyak dari mereka tidak memiliki KTP, apalagi sebagian dari mereka juga bukan merupakan warga Kelurahan Manulai II. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan. Ditambah lagi sejak 2019 kasus pandemi *covid 19* merebak, menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan dana ekstra dan lebih untuk program penanggulangan pandemi *covid 19*.

Hal ini menyebabkan alokasi dana kesatuan kerja perangkat daerah menjadi berkurang termasuk ke Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ketidakadaan dana ini menjadi faktor penghambat utama dari terhentinya kegiatan pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II. Padahal sebagai realisasi program-program di atas, langkah kongkrit yang akan dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit, tata boga dan tata rias. Sejauh ini sudah dilakukan adalah sebatas sosialisasi kepada pihak kelurahan tentang program-program yang telah rencanakan. Bordat, Davis, dan Kouzzi (2011:90) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan secara holistik bermakna memadukan proses individu dan kelompok dalam mengembangkan kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat keputusan dan mengontrol hidup mereka, melakukan tindakan, dan bergerak untuk memberikan dampak pada lingkungan sekitar mereka

Disamping faktor kekurangan alokasi dana dari pemerintah karena faktor pandemi *covid 19*, warga secara administratif dianggap liar, juga ada faktor lain yang peneliti temukan dilapangan terkait proses pemberdayaan. LSM perempuan dan anak sudah pernah melakukan kegiatan atau program pemberdayaan melalui pelatihan tata boga, akan tetapi respon para perempuan rawan sosial ekonomi ini untuk menekuni apa yang diajarkan sangat rendah, mereka lebih memilih untuk tetap memulung dari pada harus konsentrasi pada kegiatan keahlian tata boga yang diajarkan, padahal LSM perempuan dan anak sudah berencana untuk memfasilitasi akses modal kepada para donator, tapi akhirnya semua menjadi tidak berjalan. Pihak Dinas Sosial juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke TPA Manulai II agar para penghuninya untuk bisa diikutkan dalam program pelatihan tapi

sebagian besar dari mereka masih bersifat apatis. Hal tersebut merupakan suatu kendala tersendiri.

SIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kondisi para perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Manulai II sangat memprihatinkan dimana sebagian besar dari mereka terdiri dari para ibu yang sudah tidak lagi bersuami dan harus mengurus 3 sampai 4 orang anak dengan semata-mata menggantungkan hidupnya sebagai pemulung. Program pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Manulai II Kota Kupang belum bisa berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat dikarenakan kendala dana, identitas kependudukan, serta mental instan dari pada penghuni TPA Manulai II. Ke depan baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat perlu menyiapkan secara baik program pemberdayaan dan semua harus dilakukan secara terstruktur dan teratur, mulai dari pendataan, sosialisasi, pelaksanaan program, evaluasi dan *follow up* (tindak lanjut) agar program pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di Kelurahan Manulai II bisa berjalan secara baik dan efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Bordat, S.W., Davis, S.S., dan Kouzzi, S. (2011). Women as agents of grassroots change: illustrating micro-empowerment in Morocco. Indiana University Press. *Journal of Middle East Women's Studies*, 7(1). 90-119. <http://www.jstor.org/stable/10.2979/jmiddeastwomstud.2011.7.1.90>
- Dinas Sosial. 2015. *Pedoman Umum Pemberdayaan Keluarga*. <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesosdanletter=w>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Hubeis, A. V. S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan Dar Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Ife, J. dan Tesoriero, F. 2008. *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardikanto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Nasdian, F.T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Widayanti, S. 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Jurnal Welfare*. Vol. 1(1). Hal. 87-102.
- Novian. 2010. Pemberdayaan Perempuan. <http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/>. Diakses pada 12 Oktober 2020
- Huzamah Siti. 2020. Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*. 2(1), Juni 2020. 81-92.
- Saugi. W dan Sumaromo. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 226-238.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 : Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 1(2), 262–289
- Harriet. T., Opoku, N. A., Asare., dan Anin, E. K. (2014). The Role of Women in Reducing Household Poverty in the Bongo District of the Upper East Region, Ghana. *Journal of Arts and Humanities*, 3(4), 99-110